

# Efektifitas Penggunaan Kpe (Kartu Pns Elektronik) Dalam Pemberian Pinjaman Terhadap SHU Pada KPRI “Serba Usaha” Kecamatan Prambon Nganjuk

Efa Wahyu Prastyaningtyas, Hestin Sri Widiawati

[efawahyup@gmail.com](mailto:efawahyup@gmail.com), [hestin.sw@gmail.com](mailto:hestin.sw@gmail.com)

Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Prodi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri

## ABSTRAK

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan KPE (Kartu PNS Elektronik) dalam pemberian pinjaman terhadap SHU di KPRI “Serba Usaha” Kecamatan Prambon. Penelitian ini tergolong penelitian eksperimen dengan menggunakan desain *completely randomized design* dengan dua perlakuan (treatment). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan random sampling. Analisis data yang digunakan adalah independent sampel t test (uji t untuk dua sampel independent/bebas). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sistem pinjaman non KPE dengan sistem pinjaman menggunakan KPE pada KPRI “Serba Usaha” Kecamatan Prambon berpengaruh signifikan terhadap SHU dengan taraf signifikansi  $0,012 < 0,05$ . Sistem pinjaman dengan non KPE berdampak pada meningkatnya jumlah SHU dengan nilai mean 1591,25, sedangkan sistem pinjaman dengan KPE berdampak menurunnya jumlah SHU dengan mean 1255. Sehingga sistem pinjaman dengan KPE efektif untuk menekan jumlah SHU, karena salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya SHU adalah pinjaman.

Kata Kunci: KPE (Kartu PNS Elektronik), Pinjaman, SHU, Koperasi

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum di bawah naungan dinas koperasi. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang memiliki dasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Meskipun koperasi tidak mengejar keuntungan, koperasi diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang layak, sehingga koperasi mampu memperkuat dan mengembangkan usahanya. Istilah keuntungan yang digunakan pada koperasi adalah SHU (Sisa Hasil Usaha) atas dasar besarnya jasa anggota yang diberikan kepada koperasi. Keterlibatan anggota dalam kegiatan-kegiatan koperasi dan komitmen para anggota terhadap koperasi akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup koperasi. Anggota yang memiliki jasa besar dalam usaha koperasi akan meningkatkan SHU pada koperasi.

Menurut Sudarwanto (2012) Koperasi yang menjalankan berbagai jenis bidang usaha disebut koperasi serba usaha. Bidang usaha yang digeluti koperasi bisa mencakup bidang simpan pinjam, penjualan barang konsumsi, hingga pemasaran barang anggota. Meskipun koperasi menjalankan aktivitas usaha lebih dari satu jenis bidang usaha yang terpenting adalah bahwa harus ada pengelompokan atau pemisahan yang jelas atas transaksi kegiatan untuk kepentingan anggota dan transaksi kepada masyarakat atau non anggota.

Menurut Hasibuan (2008), kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bungannya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Koperasi dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa mengganggu jalannya usaha koperasi terutama dalam pencapaian keuntungannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi pembayaran gaji PNS tidak lagi dibayarkan secara manual lewat bendahara masing-masing sekolah, melainkan melalui Kartu PNS Elektronik (KPE). Kartu

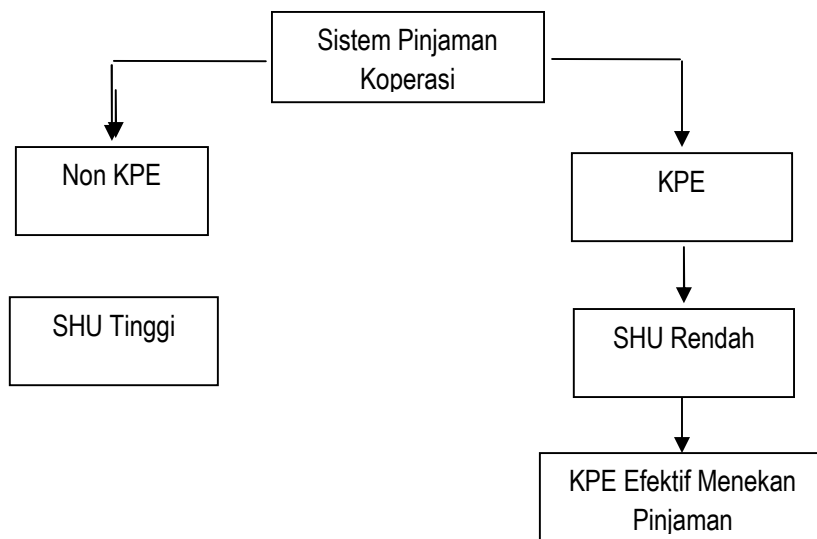
Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) adalah kartu identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik. Kartu ini diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. KPE berfungsi multiguna untuk setiap pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Pada ketentuan pasal 1 ayat 1 disebutkan peraturan kepala BKN nomor 7 tahun 2008 adalah kartu identitas seorang PNS yang memuat data PNS dan keluarga secara elektronik. Pemberian KPE ini bertujuan memudahkan administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada semua pegawai.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Serba Usaha” Kecamatan Prambon merupakan salah satu koperasi yang menjalankan kegiatannya untuk meningkatkan peranannya dalam usaha memenuhi kebutuhan para anggotanya. Untuk mencapai hal tersebut koperasi mengelola unit usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk memberi kemudahan anggota dalam menyimpan dan meminjam uang. Pada penelitian ini penulis meneliti hanya pada unit pinjaman saja, karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa koperasi sedang mengadakan penyesuaian terhadap sistem penggajian yang baru. Dimana sistemnya beralih dari pembayaran gaji PNS manual menjadi elektronik (KPE). Tentunya keadaan tersebut akan memberi dampak terhadap sistem pinjaman yang dilakukan oleh anggota. Dimana sebelum diterapkan KPE anggota tidak ada batasan gaji yang diterima, sedangkan dengan adanya KPE untuk melakukan pinjaman anggota harus mempunyai saldo tertentu pada KPE sebesar yang telah ditentukan untuk masing-masing golongan. Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektifitas penggunaan KPE dalam pemberian pinjaman terhadap SHU di KPRI “Serba Usaha” Kecamatan Prambon Nganjuk.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian eksperimen dengan menggunakan desain *completely randomized design* dengan dua perlakuan (treatment). Menurut Gozali (2008) *completely randomized design* dengan dua perlakuan (treatment) merupakan penelitian yang terdiri dari variabel independen dengan dua jenis treatment dan variabel dependen. Variabel independen (X) penelitian ini adalah sistem pinjaman, dengan 2 sistem pinjaman yaitu pinjaman dengan tanpa menggunakan KPE (non KPE) dan pinjaman dengan menggunakan KPE. Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah SHU.

Desain penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tempat penelitian adalah KPRI “Serba Usaha” Kecamatan Prambon, yang berlokasi di desa Sonoageng Kabupaten Nganjuk. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi yang melakukan pinjaman. Teknik pengambilan Sampel penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*, dengan membedakan mengelompokkan sampel menjadi 2 bagian yaitu tahun 2013-2014 untuk sistem pinjaman non KPE dan tahun 2015-2016 untuk sistem pinjaman dengan KPE. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah independent sampel t test (uji t untuk dua sampel independent/bebas). Menurut Sujarweni (2016) uji t dua sampel independent pada prinsipnya akan membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak.

Langkah-langkah analisis data:

a. Uji normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dan *PP plot standardized residual*. Imam Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 dan *PP plot standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independent t test.

c. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = tidak ada perbedaan rata-rata jumlah SHU pengguna KPE dan penggunaan non KPE dalam sistem pinjaman.

$H_a$  = ada perbedaan rata-rata jumlah SHU pengguna KPE dan penggunaan non KPE dalam sistem pinjaman.

Untuk membantu memudahkan dalam analisis data digunakan bantuan program IBM SPSS statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

KPRI Serba Usaha Kecamatan Prambon merupakan wadah atau kumpulan yang mewadahi seluruh Pegawai Negeri Sipil tingkat SD, TK dan PLB di Kecamatan Prambon. Koperasi ini didirikan Pada tanggal 19 desember 1968 koperasi ini telah mempunyai Badan Hukum nomor 551A/BH/II/12-67. Selama 49 tahun berdiri KPRI Serba Usaha Kecamatan Prambon mengalami perubahan bidang usaha. Awal berdiri KPRI Serba Usaha Kecamatan Prambon mempunyai 3 jenis usaha, yaitu simpanan, pinjaman dan pertokoan. Seiring dengan perkembangannya pada tahun 2007 jenis usaha berkurang satu untuk bidang usaha pertokoan, usaha pertokoan ditutup karena menyebabkan kredit macet. Sehingga pengurus pada tahun tersebut sepakat untuk menutup bidang usaha tersebut, dan memfokuskan pada usaha simpan pinjam saja.

Seiring dengan adanya deregulasi pemerintah tentang sistem penggajian PNS, dari manual ke KPE. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk pada september 2015 menerapkan Kartu PNS Elektronik (KPE) dan bekerjasama dengan Bank Jatim untuk pembayaran gaji PNS. Maka pengurus KPRI "SERBA USAHA" Kecamatan Prambon harus mengadakan penyesuaian terhadap prosedur (sistem) pinjaman kepada anggotanya.

Penggolongan pinjaman yang ada pada KPRI "SERBA USAHA" Kecamatan Prambon meliputi 2 pos, yaitu joint dan sebrak. Setiap pos dikenakan jasa pinjam sebesar 2%. Untuk besarnya dana pinjaman joint maksimal Rp 50.000.000,00, sedangkan pinjaman sebrak maksimal Rp 10.000.000,00. Namun kedua kelompok pinjaman tersebut mengalami perubahan setelah diterapkannya KPE, mulai tahun 2015 tinggal pos pinjaman joint saja dengan maksimal peminjaman Rp 50.000.000,00. Penutupan jasa sebrak disebabkan oleh aturan baru pemerintah tentang jumlah saldo minimal yang harus tersisa pada KPE dalam melakukan pinjaman di koperasi.

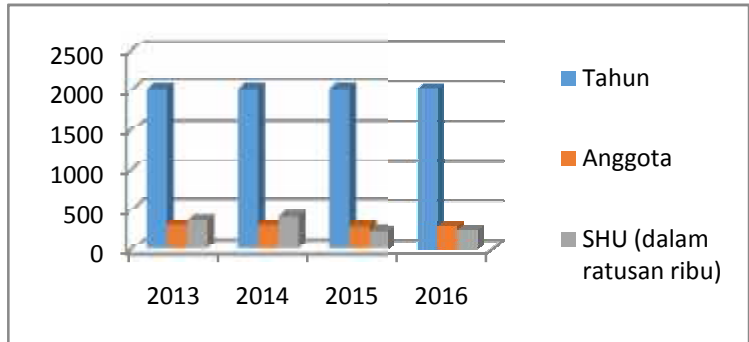
Tabel 1

Saldo minimal pada KPE untuk masing-masing golongan

No	Golongan	Saldo di KPE
1.	Gol.II	Rp 286.000,00
2.	Gol.III	Rp 327.000,00
3.	Gol. IV Non Kepsek	Rp 389.000,00
4.	Gol. IV Kepsek	Rp 510.000,00
5.	Gol. IV Pengawas	Rp 560.000,00

Sumber: KPRI “SERBA USAHA” Kecamatan Prambon

Data jumlah anggota yang melakukan pinjaman dan jumlah SHU yang diperoleh KPRI “Serba Usaha” Kecamatan Prambon tahun 2013 sampai 2016 adalah sebagai berikut:



Analisis data:

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas Peminjam non KPE menunjukkan  $0,277 > 0,05$ , hal itu berarti data bersifat normal. Sedangkan sistem pinjaman dengan KPE hasilnya menunjukkan  $0,265 > 0,05$  hal itu berarti bahwa data bersifat normal.

b. Uji Homogenitas

Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$  menunjukkan bahwa data tidak homogen. Maka peneliti tidak menggunakan asumsi ini.

**Test of Homogeneity of Variances**

SHU

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
10.969	1	78	.001

c. Uji hipotesis

Untuk melihat pengaruh data digunakan independent sample test, yang menunjukkan bahwa pada *equal variance not assumed* nilainya  $0,012 < 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pinjaman dengan sistem non KPE dengan pinjaman menggunakan sistem KPE berpengaruh terhadap SHU.

## Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
SHU	Equal variances assumed	10.969	.001	2.580	78	.012	336.250	130.331	76.781	595.719
	Equal variances not assumed			2.580	68.715	.012	336.250	130.331	76.227	596.273

## Group Statistics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SHU	NonKPE	40	1591.25	681.616	107.773
	KPE	40	1255.00	463.515	73.288

Untuk melihat keefektifan KPE kita bisa melihat dari nilai mean masing-masing, dimana non KPE nilai mean nya 1591,25 sedangkan untuk KPE nilai meannya 1255,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pinjaman dengan non KPE berdampak pada meningkatnya jumlah SHU, sedangkan sistem pinjaman dengan KPE berdampak menurunnya jumlah SHU. Sehingga sistem pinjaman dengan KPE lebih efektif untuk menekan jumlah SHU. Salah satu faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha adalah pinjaman. Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

**SIMPULAN**

Perbedaan sistem pinjaman non KPE dengan sistem pinjaman menggunakan KPE pada KPRI "Serba Usaha" Kecamatan Prambon berpengaruh signifikan terhadap SHU dengan taraf signifikansi  $0,012 < 0,05$ . sistem pinjaman dengan non KPE berdampak pada meningkatnya jumlah SHU, sedangkan sistem pinjaman dengan KPE berdampak mengurangi jumlah SHU. Sehingga sistem pinjaman dengan KPE efektif untuk menekan jumlah SHU, karena salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya SHU adalah pinjaman.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Ghozali, Imam. 2008. *Desain Penelitian Eksperimental Teori, Konsep dan Analisis Data dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Melayu. 2008. *Dasar-dasar Perbankan Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=911](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=911) KPE – Kartu PNS Elektronik menuju PNS Profesional dan Sejahtera. diakses 15 januari 2017.
- <https://www.kanreg12bkn.id/kpe-kartu-pegawai-elektronik>. Kartu Pegawai Elektronik. diakses 18 januari 2017.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sujarweni, Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2012. UU No.17 tentang *Perkoperasian*. Jakarta.